

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam studi ilmu hubungan internasional, makna dari kedaulatan negara merupakan pondasi bagi suatu negara dalam menempatkan posisinya untuk menguasai wilayah yang menjadi miliknya sesuai ketetapan dan memiliki hak kebebasan dari intervensi negara lain. Oleh karena itu, negara bebas menentukan arah politiknya selama tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain. Kebebasan arah politik berarti termasuk dalam bebas menentukan keikutsertaan terhadap organisasi internasional. hak-hak kedaulatan negara bahwa negara memiliki hak dihormati sebagai suatu negara yang sama posisi dan haknya itu telah termaktub dalam Piagam PBB pasal (2) ayat (1) dan juga resolusi majelis umum dalam (UNGA, UN Documents, 1970) yaitu resolusi GA/RES/25/2625 (1970) yang menjadi landasan hukum internasional yang harus ditaati dan dijunjung tinggi aktor internasional. Negara sebagai aktor utama yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara termasuk keutuhan wilayah dan warga negaranya dari intervensi negara lain.

Hal mengenai kedaulatan seutuhnya ini sedang diperjuangkan Ukraina hingga saat ini. Ukraina merupakan bekas bagian dari Uni Soviet yang seharusnya memiliki hak untuk mengatur arah politiknya dan mengurus negaranya secara independen. (Candradewi, 2014) Ukraina sempat bergabung dalam organisasi regional yang merupakan perkumpulan negara-negara bekas bagian dari Uni Soviet yang bernama Persemakmuran Negara-negara Merdeka (*Commonwealth of Independent States*), meskipun pada akhirnya Ukraina memutuskan untuk keluar. Namun, berdirinya Ukraina sebagai negara berdaulat yang terlepas dari Uni Soviet tidak membuat Ukraina dapat berdiri sendiri yang lepas seutuhnya dari cengkaman Rusia. Ukraina merupakan negara yang wilayahnya menjadi arah kebijakan dan kepentingan Rusia dan Rusia akan selalu menginginkan negaranya sebagai *sphere of influence* bagi Ukraina. Meskipun Ukraina telah menjadi negara berdaulat tetapi

Mutiara Nurshabrina, 2021

**KONTESTASI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI UKRAINA VS. RUSIA TERKAIT ANEKSASI OLEH RUSIA DI SEMENANJUNG KRIMEA PERIODE 2014-2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)]

karena merupakan bekas jajahan Rusia sehingga banyak persamaan etnis, agama, budaya, dan bahasa seperti di Rusia. Selain itu, Rusia masih mengintervensi Ukraina bahkan dalam pemerintahan internal di Ukraina sehingga masih adanya pengaruh pro Rusia di dalamnya. Seperti demonstrasi di penghujung tahun 2013 yang disebut sebagai “Euromaidan” yang diakibatkan oleh kekecewaan masyarakat Ukraina atas pembatalan masuknya Ukraina dalam *EU association* karena pemerintahan Viktor Yanukovich yang diduga lebih pro-Rusia sehingga Euromaidan atau demonstrasi besar-besaran di daerah Kiev. Akibat dari kekecewaan ini menyebabkan turunnya Yanukovich. Turunnya Viktor Yanukovich membuat Krimea sebagai wilayah yang banyak terdapat oposisi pro-Rusia juga melakukan demonstrasi mengganti bendera Ukraina dengan bendera Rusia yang pada akhirnya mengantarkan Krimea untuk melakukan referendum.

Mengenai hal tersebut, setelah turunnya Viktor Yanukovich, Rusia melakukan intervensi agar pengaruh Rusia tetap ada pada pemerintah interim Ukraina yang lebih condong ke arah Barat. Rusia juga berusaha untuk melindungi etnis Rusia yang ada di salah satu wilayah Ukraina yaitu Krimea, di mana Krimea merupakan semenanjung yang berbatasan dengan Laut Hitam dan Laut Azov yang berdasarkan geopolitik merupakan lokasi strategis bagi Rusia dalam menjalankan kepentingan militernya. Rusia merasa sebagai negara adidaya yang berkewajiban untuk menjaga wilayah-wilayah bekas jajahannya yaitu negara-negara anggota *Commonwealth of Independent states* (CIS) agar tidak terjadi konflik etnis terutama bagi wilayah-wilayah yang masih dominan pro-Rusia seperti Krimea misalnya. Namun, justru keterlibatan Rusia dan ketidakpastian pemerintahan Viktor Yanukovich bagi masyarakat Ukraina menyebabkan gejolak politik dan krisis Ukraina dan membuat kelompok separatis di Ukraina melakukan demonstrasi bagi masyarakat Ukraina yang pro-Barat dan pro-Timur sehingga menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada Krimea dan eskalasi konflik lainnya setelah terjadinya aneksasi di Krimea.

Masuknya Krimea ke dalam Federasi Rusia ini yang dinyatakan aneksasi oleh Ukraina dan pihak Barat sehingga mengecam Rusia yang kembali menduduki dan memanfaatkan wilayah Krimea yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam. Hal ini dapat dilihat ketika Rusia menduduki Semenanjung Krimea yang membuat

Krimea merupakan wilayah yang berhasil dianeksasi Rusia inidi mana sejak 1 Maret 2014 ketika personel militer Rusia sudah menduduki Semenanjung Krimea dan sekitar daerah Sevastopol sebagai pangkalan militer dengan menggunakan Pelabuhan di Selat Kerch untuk menempatkan pesawat tempur dan kapalnya, menjadikan Laut Hitam sebagai armada Rusia, dan faktor terselubung lainnya yaitu menjadikan Krimea sebagai *buffer* atas keberpihakan Ukraina terhadap Barat dan berpotensi untuk masuk keanggotaan Uni Eropa. Awal aneksasi di Krimea ditunjukkan dengan adanya pembersihan etnis bagi kalangan warga Krimea yang mendukung turunya Viktor Yanukovich dan merupakan upaya Rusia untuk merebut kembali etnis Rusia di Krimea terutama bagi sebagian masyarakat Krimea yang mendukung Ukraina. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Maret 2014 Krimea melakukan referendum dari Ukraina. Aneksasi ini kemudian menimbulkan respon dari organisasi internasional ketika Majelis Umum PBB menyatakan bahwa aneksasi yang dilakukan Rusia adalah ilegal dalam resolusi Majelis Umum PBB (UNGA, UN Documents for Ukraine, 2014) *United Nations General Assembly* no. GA/RES/68/262 (2014) yang akhirnya disetujui oleh 100 negara bahwa tindakan Rusia yang melakukan aneksasi terhadap Krimea itu Ilegal karena dinilai memanfaatkan krisis Ukraina ini dengan menggunakan intervensi militer dan mendukung Krimea untuk melakukan referendum tanpa ada perwakilan dari pemerintahan Ukraina hanya diwakili oleh pemerintahan Krimea setempat ketika melakukan penandatanganan masuknya Krimea ke dalam Federasi Rusia, tetapi dikarenakan resolusi dari *UN General Assembly* itu bersifat *non-legally binding* sehingga tidak begitu kuat untuk menghentikan ataupun memberi sanksi terhadap Rusia (Oktaviano, Motivasi Rusia Menganeksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014, 2015). Selain resolusi *UN General Assembly*, Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*) juga melakukan sidang untuk membahas ini yang kemudian dikeluarkan resolusi tetapi resolusi tersebut kalah telak karena Rusia merupakan salah satu dari P-5 Veto sehingga resolusi tersebut gagal ketika Rusia mengeluarkan hak vetonya.

Adanya intervensi yang dilakukan Rusia terhadap arah politik Ukraina membawa implikasi yang sangat berpengaruh kestabilan kebijakan untuk menentukan nasib sendiri bagi Ukraina dalam menentukan arah politiknya karena

intervensi yang dilakukan Rusia sudah sangat mengakar ke dalam permasalahan internal Ukraina tidak hanya pengambilalihan kependudukan seperti halnya aneksasi wilayah yang telah terjadi di Krimea tetapi juga memengaruhi dilema sebagai penduduk Ukraina atas dinamika politik negaranya terutama masyarakat Ukraina yang pro-Barat sehingga hadirnya yang dapat disebut “Euromaidan” atas pemimpin Ukraina yaitu Viktor Yanukovych yang tidak konsisten dalam mendukung arah geopolitik yang pro-Barat yang awalnya memutuskan berafiliasi dengan Uni Eropa tetapi kemudian menggagalkan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa hingga akhirnya lengser dari jabatannya namun pemerintahan interim untuk menggantikan Viktor Yanukovych dalam mengisi roda pemerintahan pun masih terkait dengan campur tangan Rusia hingga akhirnya berujung pada langkah kebijakan Rusia selanjutnya dengan melakukan aneksasi di Semenanjung Krimea untuk mempertahankan pengaruh dan kekuatannya di Eurasia. Selain gagalnya Viktor Yanukovych membawa Ukraina menjadi anggota Uni Eropa, ketidakstabilan politik ini juga membawa Ukraina yang dapat dipertanyakan akan keikutsertaannya dalam partisipasi organisasi regional dan juga internasional, apakah Ukraina ikut dalam politik luar negeri Uni Eropa atau tidak, keluarnya Ukraina dari organisasi persemakmuran negara bekas jajahan Uni Soviet yaitu CIS, dan juga dilema keikutsertaan Ukraina dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan membuat beberapa bagian wilayah di Ukraina menginginkan referendum yang salah satunya adalah Krimea (Candradewi, 2014).

Dinamika politik yang penuh dilemma yang diakibatkan oleh Viktor Yanukovych ini membuat Ukraina menjadi satu-satunya negara yang dari 128 negara yang telah mengalami penurunan dilihat dari seluruh aspek partisipasi politik dan aturan hukum jika dibandingkan ketika tahun 2010 menurut penelitian yang dilakukan oleh Bertelsmann-Transformation-Index (BTI) pada tahun 2012. Selain itu, lembaga lain seperti Freedom House menyatakan penurunan peringkat Ukraina yang sebelumnya di tahun 2010 berstatus “free” menjadi “partly free” di tahun 2011 serta OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe*) atau ODIHR (*Office for Democratic Institutions and Human Rights*) yang merupakan organisasi yang bergerak untuk menjaga keamanan Eropa di mana merasa memiliki andil untuk menjadi mediator dan memantau pada krisis Ukraina pada aneksasi

Mutiara Nurshabrina, 2021

**KONTESTASI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI UKRAINA VS. RUSIA TERKAIT ANEKSASI OLEH RUSIA DI SEMENANJUNG KRIMEA PERIODE 2014-2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)

Krimea dan eskalasi konflik setelahnya memberikan penilaian bahwa pemilihan parlemen pada tahun 2012 sebagai suatu kemunduran (Kropatcheva, 2014). Kemunduran ini dapat dilihat dari pemerintahan Viktor Yanukovych yang membuat ketidakpastian bagi masyarakat Ukraina yang pro-Barat. Oleh karena itu, melihat aneksasi yang dilakukan Rusia yang di Semenanjung Krimea, memicu reaksi dari aktor-aktor internasional lain yang turut menunjukkan keberpihakannya terhadap Ukraina. Aktor-aktor ini merupakan *major powers* Barat yang terdiri dari Uni Eropa, NATO, organisasi yang berbasis Eropa Barat bahkan AS pun turut memberikan dukungan penuh dan bantuan untuk Ukraina dalam menekan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia di Krimea. (Bundesregierung, 2015) Seperti pidato Kanselir Federal Jerman, Angela Merkel pada kesempatan Konferensi Keamanan Munich ke-51 yang menyerukan Eropa untuk memiliki mandat untuk ikut menyelesaikan krisis yang terjadi di Ukraina. Merkel juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina melanggar hukum internasional dan Memorandum Budapest di mana Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia telah menyepakati untuk menjaga integritas kedaulatan di Ukraina. Merkel bahkan menegaskan bahwa Tanah Eropa tidak akan pernah berubah. (Kompas, AS dan Uni Eropa Tegaskan Crimea Milik Ukraina, 2021) Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui Krimea sebagai kepemilikan Rusia. Amerika Serikat menetapkan posisi keberpihakannya dengan Ukraina dan menyatakan bahwa Krimea akan selalu menjadi kepemilikan Ukraina. Presiden Ukraina, Petro Poroshenko yang merupakan pengganti Viktor Yanukovych ini pun memberi harapan pada masyarakat Ukraina untuk membawa Ukraina berintegrasi dengan Uni Eropa. Hal inilah yang menjadikan masalah aneksasi ini suatu kontestasi antara Ukraina Vs. Rusia dengan Ukraina yang memiliki geopolitik yang pro-Barat dibantu oleh Uni Eropa, NATO, dan AS memberikan upaya untuk menekan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia di Semenanjung Krimea.

Berdasarkan pemaparan terkait akar masalah kasus Ukraina-Rusia, hal ini menarik perhatian bagi penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai motif dan kepentingan Rusia dalam menguasai Krimea dan menjadikan Laut Hitam sebagai armada lautnya, membahas bagaimana pengaruh geopolitik suatu negara yang

berbeda dapat memicu konflik suatu negara dengan negara lainnya serta membahas bagaimana konflik ini membentuk kontestasi geopolitik dan geostrategi Ukraina dan Rusia dalam melakukan serangan balik di antara keduanya dan bantuan *major powers* Barat (Uni Eropa, NATO, dan AS) yang diberikan Ukraina dalam menekan aneksasi dan dari kontestasi ini yang memengaruhi pembentukan arsitektur keamanan Eurasia. Mengingat konflik di Ukraina yang tidak berkesudahan seperti terjadinya aneksasi Rusia di Krimea yang memicu eskalasi konflik di antara keduanya dan situasi dilematis di Ukraina. Sudah banyaknya mediasi yang telah dilakukan dan perjanjian yang telah dibuat tetapi tidak membuat konflik ini berakhir karena menurut perspektif Ukraina perjanjian sebelumnya hanya akan merugikan Ukraina, terlebih lagi resolusi-resolusi sidang *United Nations General Assembly* (UNGA) yang tidak kuat untuk memberikan sanksi karena bersifat *non legally binding* atau tidak mengikat dan *United Nations Security Council* (UNSC) yang gagal dilayangkan kepada Rusia karena Rusia merupakan salah satu negara pemegang hak veto sehingga Rusia dapat menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi Dewan Keamanan PBB.

## 1.2 Perumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penelitian penulis lebih menekankan pada perspektif geopolitik dan geostrategi untuk menggambarkan kontestasi konflik antara Ukraina dan Rusia. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “bagaimana bentuk kontestasi geopolitik dan geostrategi antara Ukraina dan Rusia terkait aneksasi Rusia di Semenanjung Krimea di tahun 2014-2019?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui arah geopolitik antara Ukraina dan Rusia dalam memengaruhi pembentukan arsitektur keamanan atau lingkungan strategis Eurasia sebelum dan pasca aneksasi di Krimea.

2. Mengetahui bentuk kontestasi geostrategi dari konflik antara Ukraina dan Rusia 2014-2019 yang memengaruhi arsitektur keamanan Eurasia secara umum dan Semenanjung Krimea secara khusus.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih perkembangan situasi konflik antara kedua negara ini bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang untuk menjadi bahan kajian bagi perguruan tinggi terutama bagi mahasiswa, dosen, pemerhati isu tentang perkembangan tragedi aneksasi Rusia di Semenanjung Krimea melalui dengan interpretasi perspektif yang ada pada ruang lingkup Ilmu Hubungan Internasional yakni geopolitik dan geostrategi yang merupakan teori hubungan internasional konsentrasi pengkajian strategi dan keamanan.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tidak hanya dapat digunakan bagi para peneliti Hubungan Internasional oleh mahasiswa, dosen, tetapi juga masyarakat pada umumnya sebagai sumber informasi dan pemerhati isu-isu internasional dalam pengembangan penelitian.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab yang di antaranya sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup mengenai latar belakang masalah, rumusan atau batasan masalah, tujuan, manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dan juga melihat perbedaannya dengan topik yang diambil

sebagai penelitian skripsi, teori-teori yang relevan untuk digunakan sebagai pendekatan analisis topik penelitian skripsi, alur pemikiran, dan hipotesis.

- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, lokasi dan waktu penelitian.

- **BAB IV ARSITEKTUR KEAMANAN EURASIA DAN GEOPOLITIK SEMENANJUNG KRIMEA: SEBELUM DAN PASCA ANEKSASI KRIMEA**

Pada bab ini dijelaskan uraian tentang Arsitektur Keamanan Eurasia yang berimbas pada pembentukan Lingkungan Strategis Eurasia atau Geopolitik dan Geostrategis Eurasia secara umum yang kemudian masuk ke situasi khusus, kemudian mengarah pada perjalanan arsitektur keamanan di Semenanjung Krimea secara spesifik sebelum dan setelah aneksasi dilakukan untuk dapat dilihat perbedaan arsitektur keamanannya sebelum dan pasca aneksasi Rusia di Krimea.

- **BAB V BENTUK KONTESTASI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI UKRAINA VS. RUSIA DI SEMENANJUNG KRIMEA**

Pada bab ini dijelaskan bentuk kontestasi dari konflik antara Ukraina dan Rusia pada 2014-2019, bentuk konflik yang berimbas ke Semenanjung Krimea secara khusus, yang kemudian berimbas pada Arsitektur Keamanan Eurasia secara Umum.

- **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dijelaskan pernyataan singkat dari hasil keseluruhan penelitian dan saran yang mencakup anjuran untuk perbaikan atau peningkatan yang menjadi acuan untuk kemungkinan penelitian selanjutnya.